

ASLI

by Ainun Diana Lating

Submission date: 14-Mar-2023 01:30PM (UTC+0700)

Submission ID: 2036842453

File name: paten_jurnal_skopus_integrasi.docx (96.9K)

Word count: 11179

Character count: 73340

STREOTIPE ETNIS BUTON
(Suatu Tinjauan Psikologi Kepribadian)

Ainun Diana Lating, Fahmi Salatalohy
Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Ambon
ainundianalating.14@gmail.com, fahmisalatalohyfs@gmail.com

Abstrak

Streotipe merupakan suatu gejala umum dalam masyarakat heterogen dan berimplikasi luas terhadap kepribadian seseorang, lingkungan sosial, etnis, agama dan budaya. Menyamakan seseorang, kelompok, agama, lingkungan budaya, status sosial dengan pelabelan negatif tentu menimbulkan dimensi negatif dalam ruang kekerabatan masyarakat dan mendegradasi esensi kemanusiaan. Streotipe terhadap suatu golongan budaya dan agama bisa terjadi kapan dan di mana saja. Seperti pada studi kasus politik identitas di Kabupaten Seram Bagian Barat Maluku yang memosisikan etnis Buton sebagai etnis nomor dua yang tidak memiliki legitimasi atas identitas mereka sebagai manusia. Jika streotipe terus berlangsung maka harmonisasi tidak akan tercapai. Pendekatan ontologi ilmu dalam penelitian ini untuk mengkaji streotipe yang berkembang di masyarakat dengan meletakkan dasar pengetahuan untuk saling menghargai dan menghormati dalam perbedaan. Bahwa manusia bisa hidup dengan “Adanya” sebagai makhluk sosial yang memiliki nilai-nilai transenden yang berasal dari satu sumber penciptaan yaitu Tuhan Yang Maha Esa.

Keyword: Streotipe, Integrasi, Politik Identitas, Ontologi

Bab I. Pendahuluan

Suku Buton merupakan kelompok kecil dari para pendatang, yang datang ke Seram Bagian Barat. Dalam catatan sejarah, etnis Buton sudah ada semenjak abad ke-7, bahkan lebih banyak kedatangan mereka di abad ke 13/14. Di masa kedatangan mereka termasuk sebagai kelompok pendatang yang bersifat temporal, mereka juga mempunyai semangat kerja yang tinggi, mereka datang untuk mencari tempat tinggal baru. Daerah yang mereka datangi adalah pantai Hitu dan biasanya mereka tinggal di atas jungku (*Jung*) sejenis perahu layar khas Buton. Bersamaan dengan itu, Portugis mulai bergeser ke daerah teluk Ambon (Leitimur). Etnis Buton mengalami diaspora ke area itu namun tidak menjadi bagian dari kelompok Portugis.

Daerah pantai sebagai tujuan mereka. Tujuan mereka adalah membangun tempat tinggal disekitar pantai di dekat pulau Ambon. Lambat laun tempat mereka mulai berpindah ke pemukiman di seputaran wilayah di Leitimur.

Proses pindah tempat sering dilakukan oleh Etnis Buton untuk mencari sumber kehidupan yang layak terutama bagi mereka yang bekerja sebagai petani dan nelayan. Di tempat yang baru, mereka meminta sebidang tanah pada penduduk setempat untuk dijadikan tempat tinggal, dan biasanya tempat mereka itu berada di tepi pantai.

Lambat laun, datanglah sanak saudara yang lain dari Buton, sehingga tempat pemukiman mereka semakin meluas. Bersamaan dengan itu dibangun pula rumah-rumah yang baru. Kemudian proses perkawinan mereka telah mengubah susana demografis

yang ada di negeri-negeri Leitimor. Selain itu, faktor politik turut serta dalam menentukan berkembangnya pemukiman bagi masyarakat etnis Buton di daerah tersebut.

Migrasi etnis Buton ke Ambon telah berlangsung lama hingga saat ini. Pada Akhirnya, masyarakat ini menjadi salah satu kelompok pendatang yang paling dominan di Ambon. Namun perhatian tentang cara mereka berintegrasi dengan masyarakat sekitar masih sangat kurang (Palmer, 2014)

Hal ini disebabkan oleh pola hidup orang Buton yang eksklusif, tidak berinteraksi dengan penduduk lokal dan memilih pemukiman sendiri. Dari berbagai kampung Buton yang terbentuk dapat dikenal seperti Buton Airlouw, Waru, Wangsi, Amahusu, adapula beberapa rumah kebun di Hatalae, Soya, Kusu-Kusu Sere, Buton Waiputih, dan Lawena (di Hutumuri), Buton Larela di Rutong, Buton Waisarissa di Leahari. Perkampungan Buton ini tergolong besar, dibanding negeri asli setempat. Bahkan penduduknya jauh lebih banyak dari penduduk asli setempat (Salatalohy & Pelu, 2004)

Pada tahun 1999, penduduk kampung-kampung Buton tersebut telah melakukan migrasi ke wilayah lain dan membentuk komunitas baru atau menetap dengan komunitas Buton di wilayah yang aman, seperti terdapat di wilayah Leihitu, Talaga Kodok, Wanath, Waipaliti, Waiputih, Mamua, Tahoku dan lain-lain atau migrasi ke Sulawesi Tenggara. Akan tetapi proses pembauran orang-orang Buton tersebut memberikan corak baru atas kehadiran mereka. Dasar stereotipe sudah terbentuk lama pada pola pikir penduduk lokal. Sehingga beberapa pandangan negatif juga bisa disematkan pada etnis Buton yang notabene sebagai pendatang.

Misalnya penyebutan baru bagi etnis Buton *Kasta Tau e* maksudnya adalah jika orang Buton ditanya tentang suatu informasi mereka seringkali mengeluarkan kata “*Tau e*” (istilah Ambon yang artinya tidak tau menahu) walaupun sebenarnya mereka tahu tentang informasi yang ditanyakan. Penyebutan ini ditelusuri di daerah Leihitu yang telah mengenal secara dekat watak orang Buton.

Kerja bagi orang Buton adalah bagian dari upaya merubah kondisi ekonomi mereka. Semangat kerja berbanding lurus dengan hasil yang dicapai agar lebih maksimal. Sikap yang ulet dalam bekerja merupakan bagian faktor yang sangat mendukung agar mereka lebih hidup. Kelompok ini, kalau dari sisi pendapatan justru lebih mapan. Walaupun kuat secara ekonomi tetap mereka selalu dipandang sebelah mata.

Penyebutan etnis yang disebut *binongko* bukan saja bermakna negatif tetapi juga memojokan mereka. Jika ada orang yang tindak tanduknya mengikuti tradisi atau etika umum yang berlaku di tempat tersebut maka disebut “*persis orang binongko*” dan jika ada orang yang berpenampilan buruk dalam berpakaian maka disebut kasta “*binongko*”. Adapula untuk perempuan yang penampilannya kurang modis disebut dengan “*Wasaena*” dan laki-laki disebut “*La Mbogo*” atau “*La Karomo*” untuk lelaki yang penampilannya tidak rapih dan bersih.

Menurut Chauvel bahwa selain penyebutan negative tersebut (pejorative) persepsi rendah juga disematkan pada etnis Buton, baik Islam maupun Kristen (Palmer, 2014).

Bartels lebih ekstrim lagi dengan pandangannya yang mengatakan bahwa orang Ambon yang beragama Islam maupun Kristen menganggap etnis ini sebagai inferior dan kuno. Bahkan, menurut Mears orang Ambon beranggapan bahwa orang Buton sebagai pemabuk, yang cenderung melakukan kekerasan dan statusnya jauh lebih rendah dari mereka (Bartels, 2003).

Kelompok-kelompok orang Buton tersebut memiliki integrasi sosial atas dasar suku, ras, kelas dan agama. Konsep ini terbentuk melalui proses interaksi dan komunikasi

yang intens dengan tetap mengakui adanya perbedaan strata di antara orang Ambon dan orang Buton (Palmer, 2014)

Kondisi sosio antropologis yang terjadi di Seram Bagian Barat justru memberikan persepsi yang berbeda terhadap keberadaan orang Buton dengan orang Ambon. Orang Buton dipandang sebagai kelompok yang menyebabkan konflik etnis di Seram Bagian Barat. Hal ini didasarkan pada beberapa kasus yang pernah terjadi sebelumnya yaitu pertama, Penguasaan ekonomi oleh satu kelompok etno religi. Dalam hal ini kelompok etnis Buton yang notabene beragama Islam lebih menguasai perekonomian baik dari sisi produksi dan distribusi. Misalnya penguasaan dan monopoli hasil hutan. Etnis Buton menguasai hampir 40% kawasan hutan. Penguasaan tersebut dialihfungsikan untuk perkebunan cengkih, kakao dan mangga. Kedua, politisasi agama dan etnis. Sentimen keagamaan dan etnis dijadikan isu dalam pemenangan salah satu calon di pemilihan Kepala Daerah. Pemilihan kepala daerah diwarnai kecenderungan orang Buton yang memilih calon dari daerahnya yang juga beragama Islam (Patty, 2008)

Streotipe terhadap etnis Buton yang dijelaskan di awal, tentunya menimbulkan hubungan kurang harmonis orang Buton dengan orang Ambon yang berlangsung sampai saat ini. Walaupun akulturasi identitas berlangsung lama dalam hal asimilasi melalui perkawinan sehingga tidak dapat dinafikan bahwa orang Buton merupakan bagian integral dari orang Ambon, yang kemudian disebut orang Buton Ambon.

Berdasarkan kondisi riil yang terjadi di kabupaten Seram Bagian Barat tersebut, persoalan streotipe cukup dominan, eskalasinya sangat massif sehingga menjadikan daerah tersebut berada dalam kecurigaan-kecurigaan antar kelompok, baik kelompok budaya maupun kelompok agama.

Penelitian ini berupaya meletakkan deskripsi filosofis terutama aspek ontologi untuk memperkuat ketahanan masyarakat, agar persoalan stereotipe tidak menguat dalam kehidupan masyarakat Seram Bagian Barat. Permasalahannya adalah (1). Sejauhmana relasi orang Buton dengan orang Ambon dalam proses integrasi? (2). Apakah ada Streotipe orang Ambon terhadap orang Buton (3). Bagaimana kajian ontologi terhadap eksistensi orang Buton di Seram Bagian Barat?

Dalam skop Kabupaten Seram Bagian Barat diperlukan sebuah kerangka filosofis untuk memperkuat kearifan lokal terutama posisi masyarakat heterogen yang berkembang dengan nilai-nilai kearifan lokal.

Tujuan penelitian adalah mengkaji secara filosofis streotipe orang Buton dengan pendekatan ontologi.

Bab II. Metode Penelitian.

Kajian terhadap objek penelitian ini menggunakan metode wawancara tokoh-tokoh agama, budaya dan pemuda, melakukan observasi dan dokumentasi.

Wawancara dengan tokoh agama tentang (1). Perkembangan kehidupan beragama orang Buton dan orang Ambon di Seram Bagian Barat, (2). Interaksi dalam ritual keagamaan dua komunitas (3). Mereka harmonis atau tidak (4). mereka melakukan interaksi ketika rumah ibadah akan di bangun (5). Komunitas suatu agama mengalami suatu masalah.

Kemudian peneliti mewawancarai tokoh budaya terkait (1). Komunitas Buton dan Ambon lokal melakukan akulturasi budaya (2). Sikap mereka jika ada unsur budaya lain yang masuk ke Seram Bagian Barat? (3). kesigapan mereka mengantisipasi kondisi tersebut? (4). Melakukan dialog budaya? (5). Peran pemerintah dalam kegiatan tersebut?

Wawancara terkait peran pemuda dan pemudi berkaitan dengan (1). Peran pemuda-pemudi sebagai agen perubahan? (2). Kegiatan pada hari besar keagamaan (3). Peran

pemuda dalam penanganan konflik antar kampung, (4)). Hubungan pemuda-pemudi dengan tokoh adat dan tokoh agama.

Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi secara mendalam terkait stereotype: pelabelan nama atau pribadi yang inferior (Kaelan, 2010)

Terkait rumusan masalah kedua, peneliti memperoleh data dengan pendekatan *Library Research* yaitu berupaya mengkaji konsep ontologi. Ontologi adalah bidang ilmu filsafat yang mengkaji tentang wujud “Ada” atau entitas. Dengan kata lain, ontologi membahas esensi terdalam dari suatu kenyataan, misalnya, esensi manusia, dan juga esensi bahasa. Ontologi yang berkaitan dengan bahasa misalnya, bahwa bahasa juga merupakan catatan keterbatasan, bukan karena struktur bahasa itu beragam tetapi karena dengan bahasa dapat mengungkapkan pengalaman dunia (Salatalohy, 2004)

Dari uraian kebahasaan tersebut dapat dianalisis bahwa bahasa sebagai suatu realitas dapat menjelaskan “Ada”nya, karena bahasa tidak berdiri sendiri tanpa menggunakan analisis ontologi untuk mengungkapkan ke “ada”an bahasa itu sendiri. Oleh karena itu, bahasa bukan saja berfungsi sebagai alat komunikasi yang dilakukan individu melainkan proses berpikir dalam usaha memahami dunia luar secara objektif maupun imajinatif.

Ontologi membahas “Ada” yaitu setiap wujud, wujud dunia maupun wujud manusia, alam semesta maupun metafisik. Menurut Jalaludin yang paling dasariah dari dimensi ontologi adalah upaya untuk menghadirkan realitas, bersifat jamak atau plural, empiris maupun metafisik. Kebenaran bisa terungkap secara realitas jika wujud ke “Ada”nya bisa terungkap

Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut, kajian ontologi terhadap stereotype adalah upaya filosofis untuk mengungkapkan realitas terhadap pelabelan negatif, sikap inferior dan menganggap suku Buton sebagai warga kelas rendah. Kajian ontologi dilakukan untuk menganalisis dan mengungkap realitas pelabelan yang tertutup agar didapatkan sebuah konsep pengetahuan yang baru terhadap kehidupan masyarakat di Seram Bagian Barat. Dalam konteks penelitian ini, ontologi bekerja dalam rangka mempelajari hakikat sesuatu. Dengan jalan melakukan pemeriksaan atau analisis apakah sesuatu itu ada atau tidak ada.

Bab III. Hasil dan Pembahasan

A. Relasi Orang Buton dengan orang Ambon dalam Integrasi

a. Aspek Historis

Berkaitan dengan aspek historis ini, terlebih dahulu perlu mencermati definisi sejarah yang diberikan oleh Ibnu Khaldun berada dalam dua pengertian. Pertama, sejarah dilihat hanya sebagai rekaman peristiwa masa lalu. Kedua, melalui catatan sejarah karena membutuhkan penalaran kritis yang bila diteliti lebih mendalam mengandung hukum-hukum, sosial kemasyarakatan. Sejarah dalam pengertian ini mampu menjelaskan tentang sebab-akibat dan asal mula atau mengandung pengetahuan tentang bagaimana dan mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi (Sujati, 2018)

Menurut Muqaddimah-nya Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa sejarah bertujuan agar kita dapat memahami kondisi manusia, yaitu peradaban, memahami fenomena-fenomena yang secara alamiah menggabungkan pengetahuan, kehidupan liar, penghalusan adat kebiasaan, semangat kesukuan atau garis keturunan, perpecahan-perpecahan, superioritas di mana orang saling mencaplok dan menyebabkan lahirnya imperium-imperium dan dinasti, perbedaan kedudukan, begitu juga dengan pencurahan karya-karya mereka, seperti profesi-profesi yang mengagungkan, keahlian yang memberi kehidupan, ilmu-ilmu pengetahuan, ilmu-ilmu sosial, dengan harapan dapat mengubah agar benda-benda dapat berjalan dalam karakter sosial (Sujati, 2018)

Pandangan Ibnu Khaldun ini sangat cocok dengan situasi yang terjadi di Seram Bagian Barat karena mencakup kandungan dari perspektif yang meliputi adat dan kesukuan yang terdapat di wilayah itu. bahwa ada dominasi, pengagungan suku, ada imperium-imperium lokal dan dominasinya, superioritas dan perbedaan kedudukan dalam masyarakat.

Informasi tentang sejarah kedatangan etnis Buton di Seram Bagian Barat terbilang cukup minim dan bahkan tidak ada informasi tentang itu. Peneliti telah menelusuri beberapa wilayah untuk menanyakan hal tersebut, namun tidak ada sumber-sumber tertulis yang menjelaskan tentang hal itu. Namun salah satu media cetak yang bernama *Media Kita* dari Maluku Tenggara pernah menulis bahwa orang dengan etnis binongko sejak abad ke 17 sudah menginjakkan kakinya di Maluku.

Namun bila dilihat dari catatan sejarah kedatangan orang Buton di Maluku secara umum ini sangat berkaitan dengan letak geografis Buton sebagai daerah yang dekat dengan pusat birokrasi kolonial di bagian Timur Indonesia yakni Ambon dan Makassar. Maluku dikenal sebagai tempat perekrutan prajurit yang sengaja ditempatkan di beberapa wilayah di Indonesia oleh pemerintah Hindia Belanda. Segi ekonomi, Ambon dikenal sebagai pusat penghasil rempah-rempah yang laris di pasar internasional sehingga banyak pedagang yang datang.

b. Interaksi Sosial dan Keagamaan

Keberadaan etnis Buton di Seram Bagian Barat sebenarnya sama dengan etnis Ambon lokal dalam pengertian kedua etnis ini sudah sejak lama berinteraksi, baik dalam konteks sosial maupun agama, bahkan dapat dikatakan interaksi kedua etnis ini pertama kalinya lahir dari sistem keyakinan yang sama yaitu agama Islam. Dengan model inilah etnis Buton dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari komunitas lokal muslim Ambon. Dalam hal ini, etnis Buton telah dibentuk oleh sebuah proses konstruktif yang dipengaruhi oleh budaya yang oleh disebut dengan memori (Palmer, 2014).

Memori dapat dijadikan sebagai “praktek penunjuk” dan simbol identitas sebagai bagian yang dilakukan masyarakat, seringkali tanpa disadari sebagai cara berartikulasi, dan membentuk identitas diri dan hubungan dengan orang lain. Interaksi antar etnis Buton dan Ambon lebih banyak terbentuk oleh proses akulturasi melalui perkawinan

Berdasarkan analisis sosiologis antropologis asimilasi dapat dibagi dalam tiga jenis yaitu.

1. Asimilasi budaya, adalah masuknya budaya baru kedalam budaya lama masyarakat asli. Jadi kolaborasi dari kedua budaya tersebut maka munculah budaya baru.
2. Asimilasi struktural, penetrasi kebudayaan dari suatu kelompok etnik ke dalam kebudayaan kelompok etnik lain melalui kelompok primer, seperti keluarga, teman dekat, klan dalam kelompok.
3. Asimilasi perkawinan atau sering disebut asimilasi fisik yang terjadi karena perkawinan antar etnik atau antar ras untuk melahirkan kelompok atau ras baru. (Liliweri, 2005)

Berdasarkan jenis asimilasi tersebut, sebenarnya etnis Buton merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Seram Bagian Barat yang terbentuk berdasarkan asimilasi perkawinan yang berlangsung semenjak mereka mendiami wilayah tersebut. Etnis Buton telah mengalami proses naturalisasi dengan etnis setempat, proses ini kemudian membentuk suatu budaya yang sama walaupun terdapat ciri-ciri perbedaan antara orang Buton dengan orang Ambon dalam segi praktek adat. Perubahan tersebut

terlihat dari bahasa yang diekspresikan dari bentuk komunikasi antar sesama etnis Buton sendiri.

c. Perilaku Sosial antar Etnis

Keberadaan etnis Buton dan Ambon merupakan dua komunitas yang selama ini hidup berdampingan, walaupun pada prinsipnya masing-masing etnis masih memiliki perbedaan-perbedaan karena lahir dari prinsip etnisitasnya.

Menurut keterangan La Rauf, etnis Ambon di sebut dengan "sudara", penyebutan ini juga terjadi bagi etnis Buton yang dianggap saudara oleh etnis Ambon. Hanya saja istilah persaudaraan ini kadangkala ditunggangi oleh pihak tertentu sehingga sesama etnis Buton dan Ambon terjadi prasangka. Momen prasangka inilah yang kemudian menjurus pada strotipe terhadap etnis Buton. Akan tetapi masalah strotipe ini muncul pada saat menjelang pemilihan kepala daerah (Bupati). Strotipe dimainkan oleh kelompok kepentingan dengan tujuan memperkecil posisi pemilih yang mayoritas etnis Buton dengan ancaman-ancaman yang secara tidak langsung memperburuk situasi yang sudah tentram di Seram Bagian Barat.

Menurut keterangan Siauta, bahwa ancaman-ancaman tersebut ada, tetapi tidak secara langsung, dan sering diperhalus dengan istilah anak Adat dan bukan Anak Adat. Walaupun demikian, perlu diakui bahwa keragaman memberikan corak baru dengan memberikan perbedaan dalam bentuk karakter, serta fungsi fisiologis yang berbeda. Hal ini dijelaskan Patty (2008) bahwa setiap orang memiliki perbedaan yang tidak selaras dengan orang lain seperti perbedaan naluri dan dorongan biologisnya. Hal ini yang membuat keinginan yang dimiliki seseorang berbeda dengan lainnya.

Problem sosial antar etnis di Seram Bagian Barat lebih besar muatan politisnya ketimbang muatan relasi sosio antropologis. Oleh karena itu, kedua muatan tersebut membutuhkan motivasi yang berdimensi terbuka pada perubahan melawan keengganan terhadap sesuatu yang baru, ingin menyatu dengan yang lain, melawan perasaan ingin maju sendiri. Dimensi terbuka pada perubahan terdiri dari dua motivasi yaitu ingin mencari jalan sendiri dan menerima stimulasi dari luar, sedangkan keengganan terhadap sesuatu yang baru, dari tiga nilai motivasi yaitu ingin menyesuaikan diri dengan orang lain, adat istiadat, dan mencari aman. Berdasarkan penjelasan di atas tampak bahwa perilaku sosial masyarakat di Seram Bagian Barat juga dapat ditafsirkan dengan cara yang berbeda satu sama lain.

B. Strotipe Orang Ambon terhadap Orang Buton

Sebelum menjelaskan strotipe dua etnis ini, terlebih dahulu penulis menjelaskan pengertian strotipe, hal ini untuk mengukur model strotipe mana yang bisa digunakan untuk menjelaskan lokus penelitian ini.

Kreidler mendefinisikan strotipe sebagai "*a mental image of a group based on opinion without regard to individual differences*"(Susetyo, 2010)

Strotipe secara umum adalah proses menyamaratakan seluruh sifat dan perilaku individu pada kelompok sosial tertentu. Sedangkan menurut Taylor dan Moghaddam, definisi yang dianggap cukup representatif adalah strotipe

mengeneralisasikan etnis tertentu yang memiliki sifat dan sikap yang sama namun pada akhirnya pelabelan tersebut dianggap tidak sesuai.

Menurut Jhonson, stereotipe adalah sebuah keyakinan untuk menyamakan sifat-sifat tertentu yang cenderung dianggap negatif karena bisa saja dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman yang dirasakan. Keyakinan inilah yang secara sadar memberikan perbedaan antar kelompok dengan memberikan label tinggi atau rendah suatu kelompok (Susetyo, 2010).

Begitu juga yang disampaikan Hogg dan Abram mendefinisikan stereotipe sebagai penyamaan seseorang berdasarkan kategori keanggotaannya. Banyak orang percaya bahwa kelompok satu dengan lainnya memiliki sifat dan ciri khasnya tersendiri yang membedakannya dengan kelompok lain.

Berdasarkan tiga definisi tersebut, tampak jelas bahwa problem stereotipe terhadap etnis Buton merupakan suatu generalisasi yang menjelaskan bahwa etnis Buton dianggap sebagai etnis yang “rendah” “terbelakang” dan tidak mempunyai hak menjadi pemimpin di wilayah tersebut. Akan tetapi, stereotipe seperti ini cenderung tidak diucapkan secara langsung, cukup menjadi komoditas bagi kelompok maupun person yang menganggap mereka sebagai anak adat di Seram Bagian Barat.

Dalam kondisi seperti ini, stereotipe tersebut tidak terlalu nyata dan memiliki signifikansi sosial luas berupa ancaman-ancaman yang halus dan hukuman-hukuman ringan terhadap interaksi yang dilakukan semua orang. Semua orang memiliki cara untuk membuat orang-orang di sekitarnya harus membayarkan sesuatu: anak-anak dapat melakukannya dengan cara menangis, para pembantu dan pegawai dapat melakukannya dengan cara bekerja berlambat-lambat, para istri dapat melakukannya dengan cara marah-marah, dan para suami dapat melakukannya dengan cara pulang larut malam. Kebanyakan orang juga mahir untuk mengisyaratkan rasa tidak puas mereka dengan halus, respon yang lamban terhadap suatu pernyataan, hilangnya perhatian, alis yang terangkat, dahi yang berkerut, helaan napas. Semua ini seringkali juga menjadi isyarat ancaman, dalam arti bahwa penerimanya menyadari bahwa suatu tindakan menghukum akan ditimpakan bila mereka tidak berhati-hati. Secara singkat, ancaman dan hukuman dapat muncul di manapun dalam berbagai hubungan sosial.

Menurut hemat peneliti, stereotip yang di dalamnya mengandung unsur-unsur “diam” justru akan memperparah proses kesinambungan hidup masyarakat. Bisa juga stereotipe yang tertutup seperti itu menimbulkan konflik, karena setiap ada masalah yang muncul tidak pernah dikomunikasikan dengan baik.

Sinyalemen ini sesuai dengan apa yang dikemukakan Pruitt dan Rubin, bahwa keinginan untuk menghukum orang lain tidak selalu harus diekspresikan dalam bentuk perilaku nyata. Impuls-impuls agresif biasanya justru ditekan. Penekanan ini mungkin disebabkan oleh sejumlah sumber. Termasuk diantaranya adalah larangan-larangan sosial terhadap (sifat agresif), hati nurani, kemampuan berempati terhadap penderitaan yang mungkin akan dialami oleh target (stereotipe).

Menurut Kriesberg bahwa semakin sering interaksi yang dilakukan oleh kelompok yang berkonflik maka semakin kecil kemungkinan akan terjadinya

konflik baru. Selain itu juga, sikap saling menghargai dan memahami norma yang berlaku bisa menjadi pencegah terjadinya konflik (Muliono, 2020).

Hecht, *at.al*, mendefinisikan hal tersebut dengan mengungkapkan bahwa
“*An individual identifies him-or herself through his or her relationships with others, such as marital partners, coworkers, and friends (e.g. I am a husband, accountant, friend). Social roles are particularly important in shaping this aspect of identity. [In addition] a relationship itself is a unit of identity. Thus, a couple as a unit, for instance, can establish an identity (Hecht & Phillips, 2021).*”

Jadi, relasi sosial itu sangat penting untuk menghubungkan orang lain (*the others*) dengan kita sebagai suatu komunitas yang selalu membedakan kehadiran orang lain tersebut. Oleh karena itu, yang penting untuk dicermati adalah hubungan antar kelompok tidak terlepas dari perbedaan mereka dalam kaitannya dengan akses mereka terhadap sumber daya, baik ekonomi, politik maupun kultural. Sumber daya ini pada gilirannya terkait erat dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar manusiawi seperti pangan, sandang, keamanan dan identitas. Perbedaan akses terhadap sumber daya sebagaimana dipersepsikan oleh masing-masing kelompok selanjutnya akan membawa munculnya perasaan nyaman (*secure*) atau tidak nyaman (*insecure*). Modalitas hubungan antar kelompok akan sangat ditentukan oleh, dan di mana letak masing-masing kelompok dalam kontinum *security-insecurity*.

Berdasarkan uraian tersebut, berarti stereotipe tidak muncul karena satu faktor saja. Stereotipe bisa jadi merupakan suatu sikap yang menggeneralisasi seseorang atau kelompok dengan sapaan, bentuk dan sejenisnya. Misalnya bentuk muka atau perilaku yang kurang menimbulkan simpati terhadap kelompok lain.

Berkenaan dengan hal tersebut, Neuliep & Johnson (2016) menyampaikan argumentasinya sebagai berikut:

“*. . . face is not what one thinks of oneself, but what one thinks others should think of one’s worth. Since the claim of face is about one’s image held by others, one cannot claim face unilaterally without regard to the other’s perspective. . . . the claim for face is the claim that the other should acknowledge, whether explicitly or implicitly, that one possesses the claimed virtues. . . . face, in this sense, is different from such psychological concepts as self-esteem, self-concept, ego, and pride, which can be claimed without regard to the other’s perspective.*”

Tampak bahwa persoalan stereotipe cenderung diekspresikan lewat elemen-elemen fisik maupun kelemahan-kelemahan seseorang dalam suatu kelompok masyarakat. Konteks ini sangat sesuai dengan stereotipe yang sedang diteliti sekarang ini, bahwa hal itu merupakan pelabelan yang disematkan pada sifat tertentu sebuah kelompok yang masih bersifat subjektif, hanya karena berasal dari kelompok yang dianggap tidak seketurunan atau sederajat. Pelabelan sifat yang dilakukan tersebut bisa bermakna positif atau negatif.

Verdeber mengatakan bahwa stereotipe merupakan sikap dan karakter yang menempel pada kelompok tertentu kemudian dijadikan patokan dalam menilai negatif atau positif sifat kelompok lain (Liliweri, 2005).

Berdasarkan uraian dan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa persoalan stereotipe yang ada di Seram Bagian Barat lebih cenderung pada hal-hal negatif. Hal ini didasarkan pada cara pandang sebagian masyarakat terhadap etnis Buton yang menjadi objek kajian penelitian ini.

a. Stereotipe Sosial

Stereotipe sosial muncul karena dilatarbelakangi oleh berbagai faktor misalnya, keadilan sosial dan pembagian peran-peran politik dan partisipasi dalam dunia politik.

Tergambar jelas bahwa kesenjangan politik dan kesenjangan sosial menjadi sebab utama munculnya stereotipe di wilayah Seram Bagian Barat. Pada tataran yang lebih eksklusif stereotipe sosial ini muncul sebagai kecemburuan atas besarnya peran yang melibatkan etnis Buton dalam berbagai segi kehidupan. Di pasar, perkantoran, pendidikan yang menyebabkan stereotipe tersebut bisa digeneralisasi secara umum, bahwa etnis Buton merupakan etnis pendatang yang tidak perlu diberi ruang untuk berkreasi secara politik maupun sosial. Padahal dalam konteks sehari-hari, peran etnis Buton semakin mengecil pada sektor-sektor ringan dan ada yang termarginalkan. Maka sebenarnya, kita membutuhkan suatu persepektif yang adil terhadap pemerataan dalam bidang ekonomi maupun peran kelompok masyarakat dalam politik.

Presentase etnis Buton memang lebih besar dari etnis Ambon di Seram Bagian Barat sekitar 50:45 dengan demikian, komunitas Buton lebih banyak dari komunitas etnis Ambon. Akan tetapi hal ini bukan berarti semua etnis Buton memiliki peran yang besar untuk menentukan suatu kebijakan. Begitu pula etnis Ambon, masih punya peran yang lebih besar dan cukup disegani oleh etnis pendatang.

Hubungan antar etnik dapat terjadi melalui stratifikasi sosial. Pembicaraan mengenai topik tersebut sangat erat kaitannya dengan penilaian masyarakat terhadap pembagian harta kekayaan, kekuasaan, dan martabat seseorang atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Jadi, masalahnya terletak pada penilaian masyarakat terhadap status seseorang, apakah status itu diperoleh sejak lahir (*ascribed*), seperti jenis kelamin, adat istiadat dan agama atau status yang diperoleh dalam perjalanan kehidupan (*achieved*), misalnya melalui pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal, dan lain-lain.

Pengintegrasian etnis ke dalam suatu kerangka stratifikasi sosial, dalam konteks pendekatan kelas itu adalah tidak lagi relevan untuk memahami suatu kategori mekanisme dari ketidaksamaan dalam masyarakat di jaman ini. Sorotan terhadap sistem kelas dan etnis sering yang saling berhubungan di dalam kategori masyarakat yang multietnis....akan tetapi mengukur seseorang atau kelompok berdasarkan hubungan kelas hampir tidak menjadi diskursus serius dalam berbagai bidang kehidupan, karena sistem kelas mengabaikan kekuatan kelompok dan mengutamakan keistimewaan kasta itu sendiri.

1 Stereotip berdasarkan Identitas Etnis

Secara antropologis, masyarakat asli Maluku Tengah berasal dari dua pulau besar, yaitu Pulau Seram dan Pulau Buru, kemudian bermigrasi ke pulau-pulau kecil di sekitarnya. Para migran dari Pulau Seram menyebar ke Kepulauan Lease (Pulau Haruku, Pulau Saparua, dan Pulau Nusalaut) dan Pulau Ambon. Migrasi ini, memberi dampak terhadap peran Kepulauan Lease sebagai pusat kebudayaan baru yang diintrodusir oleh Pemerintah Kolonial Belanda, sehingga terjadi asimilasi antara kebudayaan baru dimaksud dengan Kebudayaan Seram yang mendapat pengaruh dari kebudayaan sekitarnya, yaitu pengaruh kebudayaan Melanesia dan Melayu, serta kekuasaan Ternate dan Tidore.

Dalam rangka pengawasan terhadap penduduk, pemerintah kolonial Belanda menurunkan penduduk dari pegunungan ke pesisir pantai, sehingga komunitas-komunitas dengan teritori yang disebut *Hena* atau *Aman*, berganti nama dengan *Negeri*, yang diciptakan oleh pemerintah kolonial. Dalam proses sosio-historis, negeri-negeri ini terbentuk berdasarkan kelompok dalam komunitas agama tertentu, sehingga timbul dua kelompok masyarakat yang berbasis agama yang kemudian dikenal dengan sebutan *Ambon Sarani* dan *Ambon Salam*. Pembentukan negeri seperti ini, memperlihatkan adanya suatu totalitas kosmos yang memperkuat solidaritas kelompok, namun pada dasarnya rentan terhadap kemungkinan konflik. Oleh sebab itu, dikembangkanlah suatu pola manajemen konflik tradisional sebagai pencerminan kearifan pengetahuan lokal guna mengatasi kerentanan konflik dimaksud seperti *Pela*, *Gandong* dan hubungan kekerabatan lainnya.

Teritori-teritori baru ini (negeri) diatur struktur pemerintahannya yang mirip dengan struktur pemerintahan di Negeri Belanda. Dengan struktur pemerintahan demikian, maka negeri-negeri menjadi "*negara-negara kecil*" dengan pemerintah, rakyat dan teritori tertentu, dipimpin oleh *Raja* yang diangkat dari klen-klen tertentu yang memerintah secara turun-temurun, dan kekuasaan di dalam negeri, dibagi-bagi untuk seluruh klan dalam komunitas negeri. Dalam proses penataan struktur pemerintahan negeri, terjadi perubahan institusi sosial, seperti *Saniri Negeri* yang sebelumnya merupakan *lembaga peradilan*, berubah fungsi menjadi semacam badan perwakilan rakyat.

Yang disebut orang dagang, ialah para pendatang dari luar negeri, baik karena ikatan perkawinan dengan anak negeri, maupun karena tugas-tugas pelayanan masyarakat (guru, mantri kesehatan, mantri pertanian, dan lain-lain), atau karena aktivitas ekonomi (penggarap tanah atau pemungut hasil hutan, atau pedagang). Jadi, orang dagang di sebuah negeri, dapat berasal dari orang Maluku asli yang berasal dari negeri lain, ataupun pendatang dari luar Maluku, yaitu yang berasal dari Buton, dan suku bangsa Cina serta Arab. Khusus pendatang dari luar Maluku, etnis yang dominan dari segi kuantitas ialah etnis Buton. orang dagang dari luar Maluku ini datang dan menetap dalam negeri, baik secara berbaur dengan anak negeri maupun membentuk suatu komunal lain dalam petuanan negeri, lebih didominasi oleh kepentingan ekonomi.

Orang dagang yang berasal dari etnis Buton yang berdiam di sebuah negeri, biasanya dalam jumlah puluhan kepala keluarga, dan hampir seluruhnya datang dan menetap dalam negeri Islam dan Kristen. Mereka ini, sudah ratusan tahun mendiami negeri-negeri Islam dan Kristen, dan kehadirannya sebagai petani penggarap lahan, baik Tanah Dati maupun Tanah Negeri. Sejak kedatangan etnis ini hingga tahun 1970an, mereka membentuk komunal yang terpisah dengan anak negeri, dan hidup dengan tradisi maupun agama yang dianutnya secara bebas.

Orang dagang yang berasal dari keturunan Arab atau Cina, datang dan mendiami sebuah negeri dalam jumlah yang sangat kecil, yaitu hanya satu atau beberapa kepala keluarga. Mereka ini, hadir sebagai pedagang yang tidak membentuk komunal yang terpisah dari anak negeri, tetapi berbaur dalam komunitas anak negeri. Walaupun mereka berbaur dengan anak negeri, pada umumnya, tradisi nenek moyangnya tetap dipertahankan, terutama yang berasal dari keturunan Cina. Demikian juga agama yang dianutnya, terutama keturunan Arab, pada umumnya tetap dipertahankan, sekalipun mereka mendiami sebuah negeri yang pemeluk agama anak negerinya berbeda. Saat akan melaksanakan ibadah berjamaah misalnya, umumnya mereka melakukan ibadah di negeri yang sama agamanya atau ke kota terdekat.

Kontak sosial antar anak negeri dari dua atau lebih negeri, terjadi karena hubungan kekerabatan, yang terakomodasi dalam berbagai wujud termasuk *Pela* dan *Gandong*, atau karena hubungan ekonomi maupun sosial lain, seperti pendidikan anak, atau acara-acara keagamaan maupun hari-hari besar kenegaraan. Sebaliknya, kontak sosial antara anak negeri dengan orang dagang, terutama yang berasal dari luar Maluku, terjadi karena kegiatan ekonomi, sehingga pola hubungan kedua kelompok masyarakat ini lebih dimotivasi oleh kepentingan ekonomi semata.

Berdasarkan gambaran antropologis dan sosiologis di atas, sesungguhnya dalam kehidupan sosial, terutama di daerah pedesaan terdapat tiga pengelompokan masyarakat, yaitu anak negeri serani, anak negeri salam, dan orang dagang. Perikat sosial antar satu kelompok dengan kelompok lainnya, berbeda-beda. Perikat sosial yang mengikat hubungan sosial anak negeri serani dan anak negeri salam, antara lain yang menonjol ialah nilai-nilai budaya *Pela* atau *Gandong* yang diyakini mempunyai kekuatan supranatural yang sangat mempengaruhi perilaku sosial kedua kelompok masyarakat ini. Wujud keterikatan budaya ini secara praktis terlihat dari sifat kegotong-royongan antar kedua negeri yang mempunyai hubungan *pela* atau *gandong*. Sifat kegotong-royongan ini, dalam realitasnya memasuki area identitas kelompok yang sensitif, yaitu dalam hal pembangunan rumah ibadah, di mana negeri serani merasa berkewajiban untuk menyiapkan bahan bangunan (biasanya kayu) dan bersama-sama membangun mesjid.

Demikian sebaliknya, negeri salam merasa berkewajiban untuk menyiapkan bahan bangunan dan bersama-sama membangun gereja. Kewajiban ini didasari atas rasa kewajiban sosial, moral, dan ritual, dan sama sekali tidak ada nuansa ekonomi di dalamnya. Kewajiban yang bernuansa sosial, moral dan ritual ini, tidak mengurangi ataupun mengganggu kepatuhan terhadap ajaran agama yang dianut oleh anak negeri tiap negeri yang berbeda agama ini, bahkan mempertebal rasa saling menghargai perbedaan agama antar kedua negeri tersebut.

Pola hubungan Anak Negeri dengan Orang Dagang, dipererat oleh kepentingan ekonomi dari masing-masing kelompok. Sehingga yang menjadi perekat hubungan sosial antar kedua kelompok masyarakat ini, bukan agama, tetapi transaksi ekonomi. Hal ini terjadi, karena pada umumnya Orang Dagang yang terbanyak berasal dari Buton, mendiami dan menggarap lahan milik petuanan Negeri Serani. Sedangkan Orang Dagang dagang asal Negeri lain, pada umumnya pola hubungan sosial dengan Anak Negeri direkat oleh kekerabatan karena perkawinan atau pekerjaan sosial lain. Sebab itu, pandangan Anak Negeri terhadap Orang Dagang yang berasal dari Negeri lain, berbeda dengan yang berasal dari luar. Orang Dagang dari Negeri lain, masih dilihat sebagai suatu kesatuan budaya, sedangkan terhadap Orang Dagang dari luar Maluku Tengah, dilihat sebagai pendatang dan orang di luar kesatuan budaya. Karena itu, ada perlakuan yang berbeda dari Anak Negeri terhadap Orang Dagang yang berasal dari Negeri lain

dengan yang berasal dari luar Maluku Tengah. Namun ada perlakuan yang sama kepada kedua sub kelompok Orang Dagang ini, ialah kedua-duanya tidak diberikan hak dalam penguasaan Tanah Dati atau Tanah Negeri.

Streotype yang terbangun selama ini memang berdasarkan pada perbedaan etnis sebagaimana yang terjadi secara umum di Maluku. Sebagian besar etnis Buton berada pada posisi marjinal karena secara struktural sangat miskin dan tidak berpendidikan. Komunitas ini sering ditemukan pada pusat-pusat ekonomi kota Ambon maupun di Seram Bagian Barat. Tetapi tidak dapat dipungkiri, bahwa sebagian besar etnis Buton di Maluku secara umum juga telah menguasai sentra-sentra ekonomi dan birokrasi sehingga mau tidak mau, cara memandang keberhasilan etnis buton tentunya ada pihak yang suka dan ada juga yang tidak.

Streotype terhadap orang Buton sebenarnya bersumber dari sikap orang Buton sendiri, sebagian sumber menyatakan bahwa orang Buton itu sangat ambisius dan oportunist, terutama dalam masalah politik dan birokrasi. Kondisi ini menurut hemat saya, di satu sisi, memang tidak bisa dinafikan karena kenyataan menunjukkan bahwa walaupun orang Buton itu sudah lama mendiami Maluku tetapi pola kehidupan dan sikap mereka tidak berubah. Orang Buton sering memiliki standar ganda dalam menatap kehidupannya di Maluku, sehingga sangat tidak dimengerti kalau orang Buton hanya menjadikan Maluku sebagai tempat pelarian untuk memperbanyak lumbung ekonomi mereka. Di sisi lain, orang Buton sangat berbeda dengan kelompok yang disebutkan, karena kebanyakan dari orang Buton juga sudah menganggap Maluku sebagai tempat kelahirannya dan tidak ingin kembali ke Buton.

c. Konflik Horizontal di Seram Bagian Barat

Secara masif, peneliti belum menemukan suatu konflik yang disebabkan oleh masalah streotip ini, yang ada cuma konflik kriminal biasa (mabuk, perkelahian antar kampung), yang kemungkinan besar masalah streotip diikutsertakan untuk menambah kebencian satu kelompok terhadap kelompok lain.

Faktor struktural atau latar belakang konflik didefinisikan sebagai *"factors create pre conditions for social conflict. They can include systematic political exlusions, inherent economic inequality. Lack of adequate and responsive institusions, shifts in a demographic blance, economic decline, and ecological land deterioration"*

Patty (2008) telah melakukan analisis studi awal dan hasil pengujian di lapangan menjelaskan tentang faktor-faktor struktural dasar yang mempengaruhi konflik etno religi dan sumber daya yaitu faktor *Relative Deprivation* RD dalam konflik ini adalah kesenjangan antara beberapa kelompok etnis (lokal dan pendatang) dalam hal perebutan sumber daya ekonomi (ekonomi, hutan, tanah dan akses politik). Di samping itu juga munculnya kesenjangan antara pemerintah (negara) untuk mengelola berbagai sumber dana dalam hal ini hutan dan tanah. Banyak areal hutan adat yang tunduk pada hukum ulayat dikuasai oleh individu atau kelompok etnis tertentu. Tentunya kelompok etnis tertentu ini adalah kelompok etnis pendatang, sehingga yang merasa dirugikan adalah kelompok etnis lokal. Kelompok etnis pendatang adalah etnis Buton.

Menurut Pamugasejati (Patty, 2008), mengatakan bahwa konflik di Seram Bagian Barat dapat dipicu oleh beberapa faktor pemicu. Pertama, faktor struktural dapat berupa pertentangan politik yang sistematis, ketidakadilan ekonomi,

ketidakseimbangan demografi (jumlah penduduk) dan penyelewengan ekonomi. Kedua, ciri utama dari faktor struktural ekonomi adalah bertahan dalam jangka waktu panjang dalam struktur masyarakat.

Oleh karena itu perlu diangkat beberapa jenis konflik untuk menentukan pertaliannya dengan bidang-bidang yang telah disinggung sebelumnya.

Konflik etnik lokal dusun Namatotor dan negeri induknya Latu terjadi pada tanggal 30 April 1986. Kejadian ini berawal dari persoalan batas tanah, konflik ini mengakibatkan korban jiwa dari etnis lokal yang merupakan etnis lokal. Penyebabnya adalah masing-masing dari kedua komunitas mengaku bahwa tanah itu adalah milik mereka, maka terjadi pembunuhan dari komunitas Buton yang mendiami dusun Namatotor.

Kemudian pada tanggal 2 Mei 2007 terjadi bentrokan antar warga desa Saleman dan Desa Horale, Kecamatan Seram Utara Kabupaten Seram Bagian Barat. Empat warga tewas dan beberapa orang lainnya dikabarkan luka-luka. Selain itu kerugian yang terjadi antara lain 106 rumah terbakar, tiga gereja rusak, satu motor dinas terbakar dan satu sekolah dasar (SD) terbakar. Pihak yang tewas berasal dari desa Horale.

Berdasarkan dua kasus tersebut, belum tampak adanya korelasi antara konflik dengan stereotipe. Ini merupakan konflik batas tanah yang tentunya setiap saat bisa terjadi. Menurut hemat saya, konflik ini merupakan satuan yang terpisah dan belum dapat dikategorikan sebagai konflik akibat stereotipe. Masalahnya adalah, sejak kapan konflik akibat stereotipe ini terjadi. Sejauh ini belum ada data tertulis yang menjelaskan hal tersebut. Walaupun demikian, intensitas pemicu konflik ini perlu dideteksi sedemikian rupa sehingga masyarakat dapat terhindar dari konflik yang sebenarnya yang telah melanda Maluku secara masif sejak tahun 1999.

Menurut Lippman yang dikutip Susetyo, stereotipe dapat menjadi tameng pertahanan diri seseorang yang menyangkut dengan dorongan batinnya. Konflik internal yang diproyeksikan pada sasaran di luar sebagai tidak bersalah atau sebaliknya. Dengan demikian permusuhan terhadap "orang luar" dapat datang terlebih dulu dan baru kemudian citra sifat-sifat khasnya yang dianggap benar (Susetyo, 2010).

Oleh karena itu ada tiga model pendekatan yang diajukan oleh Hamilton dan Troiler yang dikutip susetyo sebagai berikut:

1. Pendekatan proses motivasi, yang memandang stereotipe sebagai hal yang berfungsi melayani kebutuhan intrapsikis dari pengamat yaitu menjaga harga diri dalam usaha mengatasi ketidakmampuan diri
2. Pendekatan sosio kultural yang memusatkan perhatiannya pada proses belajar sosial. Isi keyakinan stereotipe dipandang sebagai hasil proses sosialisasi, yang dipertahankan serta diperkuat oleh pengaruh sosial dan orang lain atau kelompok referensi yang penting
3. Pendekatan yang fokusnya pada struktur kognitif dan pengolahan informasi yang menjadi faktor pemicu munculnya stereotipe. Stereotipe dipandang sebagai proses dan hasil dari pengolahan informasi.

Stereotipe adalah hasil dari mekanisme *stereotyping* yang prosesnya telah berlangsung lama. Menurut Hamilton dan Troiler, *stereotyping* merupakan proses

mengkategorikan informasi mengenai individu dari satu kelompok yang memiliki lawan interaksi yang bersifat konkrit maupun simbolik dari individu sebagai pengamat (Susetyo, 2010)

Sebagaimana dijelaskan oleh Simmel dalam Susetyo, bahwa konflik merupakan sesuatu yang sulit untuk dihindari dalam bermasyarakat. Konflik dapat menjadi faktor utama pengubah kepentingan kelompok, organisasi maupun kesatuan lainnya. Senada dengan itu, Simmel menjelaskan bahwa apabila individu menjadi lawan atas rekannya maka konflik yang terjadi bukanlah murni karena faktor sosial walaupun akhirnya hasil yang diperoleh tidak menyenangkan. Pada kenyataannya faktor disasosiatif dapat menjadi pemicu terjadinya kecemburuan dan kebencian dan inilah yang menjadi penyebab terjadinya konflik. Dengan kata lain konflik ada untuk mengatasi prinsip dualisme yang berbeda walaupun dengan cara berbeda yang meniadakan pihak pesaing.

Penjelasan Simmel di atas sebenarnya masih ditemukan dalam kenyataan sehari-hari masyarakat di Seram Bagian Barat, di mana konflik yang sesungguhnya terjadi bukan karena masalah stereotipe, atau kebencian satu kelompok terhadap kelompok lain, kecemburuan pada aspek ekonomi yang secara tidak langsung dikuasai oleh satu kelompok saja.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa konflik yang terjadi selama ini memang tidak ada hubungannya dengan stereotipe. Akan tetapi perlu diwaspadai juga bahwa stereotipe sering dijadikan alasan kedua untuk memperbesar konflik dengan melancarkan perbedaan eksistensial pendatang dan anak adat.

C. Ontologi Kemanusiaan orang Buton

Sebelum menjelaskan sub tema ini terlebih dahulu peneliti mendudukan konsep ontologi untuk mendapatkan korelasi filosofis sosiologis. Ontologi adalah suatu konsep kefilosofan yang paling kuno dari Yunani. Maka dalam frasa Yunani ontologis adalah gabungan dari kata “*Ontos*” dan “*Logos*”. *Ontos* artinya “yang ada” sedangkan “*logos*” berarti ilmu.

Pada dasarnya Ontologi mengkaji tentang sesuatu “yang ada” dalam ilmu pengetahuan, hakikat objek pengetahuan, dan hakikat hubungan objek-subjek ilmu.

Ilmu pengetahuan tentang manusia memerlukan kajian ontologis, sehingga dalam ontologi memerlukan pemeriksaan dan analisa mengenai ilmu pengetahuan. Ontologi ilmu yang kajiannya tentang seluruh aspek kehidupan yang dapat diuji melalui pancaindra. Ilmu yang dipelajari bisa berupa objek empiris seperti manusia, hewan, tumbuhan dan benda lainnya. Juga mempelajari tentang berbagai gejala atau peristiwa yang memiliki manfaat bagi manusia. Dalam perkembangannya aktivitas ilmu terbagi atas tiga masalah yaitu apa yang ingin diketahui, bagaimana cara mendapatkannya dan nilai apa yang terkandung dalam pengetahuan tersebut. Untuk menjawab pertanyaan itu, maka perlu adanya nilai pengetahuan dan sistem berpikir yang sedikit radikal, sistematis dan universal sebagai kebenaran dari ilmu yang kemudian dipelajari dalam filsafat ilmu (Rokhmah, 2021)

Berdasarkan deskripsi ontologi di atas dapat dijelaskan bahwa kompetensi ontologi sangat luas karena berkaitan dengan pengetahuan tentang “Ada”. Di mana manusia memiliki eksistensi diri dalam suatu budaya beragam. Eksistensi manusia menurut

Aryati (2018) *etre et le neant*, ditentukan oleh dua dimensi yaitu *etre e²³oi dan etre pour soi*, “berada pada dirinya sendiri” dan “berada bagi diri²³ sendiri” yang pertama adalah realitas objek-objek, benda-benda yang kita hadapi merupakan realitas mati, tertutup, tanpa kesadaran, tanpa makna. Berada baginya dirinya sendiri adalah k²³adaran manusia. Subjek yang oleh Hegel dinamakan dengan *Fur sich sein*. Maksudnya pengada yang mengada “bagi dirinya sendiri” yang menyadari diri sendiri.

Untuk membentuk sebuah kesadaran diri yang holistik dan dinamis, diperlukan pemahaman yang baik terhadap lingkungan sosial di mana manusia berada. Wujud dari watak kemanusiaan yang mandiri, terbentuk dalam wujudnya yang otonom. Dalam konsep behaviorisme bahwa yang baik dan benar merupakan perlakuan yang dikuatkan dengan nilai positif dari lingkungan sosial. Keadaan benar itu sangat berkaitan dengan etika tradisional masyarakat Buton secara umum yang masih tetap dijalankan diantaranya sikap ramah, suka menolong, penyayang, dan tidak suka menyendiri yang menjadi kebiasaan dalam berbangsa dan bernegara (Kosilah & Andarias, 2019)

Masyarakat Buton menjadi pribadi yang unik serta berwibawa dalam menjalin pergaulan dan bermasyarakat. Jadi secara sosio antropologis, masyarakat Buton memang memiliki karakter halus, ulet dan tekun untuk menjalani kehidupan mereka. Mereka berada dalam “Adanya”. Jadi secara ontologi pengetahuan mengisyaratkan bahwa eksistensi manusia itu wajib dihargai, dihormati dengan segala bentuk adat istiadat dan perilaku mereka. Karena manusia memiliki kemampuan kognitif yang pada dasarnya merasa dirinya juga benar. Akan tetapi merujuk pada pandangan Immanuel Kant, mengatakan bahwa “kita tidak dapat mengetahui siapa diri kita sebenarnya”.

Berdasarkan pemikiran Kant tersebut dapat ditarik suatu makna bahwa pengkajian ontologis sangat diperlukan untuk menelusuri realitas kehidupan manusia terutama eksistensi orang Buton. Dengan kata lain bahwa, eksistensi orang Buton walaupun terlihat mereka menyembunyikan jati dirinya, itu bukan berarti mereka tidak memiliki eksistensi diri. Apalagi mereka (orang Buton) mengalami banyak tantangan di tengah-tengah serbuan politik²¹entitas.

Pada hakikatnya, integrasi merupakan upaya politik kekuasaan dalam menyatukan berbagai unsur masyarakat yang majemuk sehingga harus tunduk pada aturan kebijakan politik yang dilandasi dari nilai kultur dalam masyarakat majemuk, sehingga munculnya kesepakatan bersama dalam mencapai tujuan di masa depan demi kepentingan bersama (Maliki, 2018). Namun, bukan hanya orang Buton yang tunduk pada aturan tersebut yang dibuat, namun untuk semua lapisan masyarakat sehingga memiliki hak dan tanggung jawab untuk selalu menjaga dan melindungi keberadaan mereka.

Masyarakat yang semakin terbuka membutuhkan sistem komunikasi yang lebih terbuka dari biasanya. Hal ini untuk mengukur seberapa besar tingkat partisipasi komunikasi masyarakat setempat dengan kelompok orang-orang yang dinilai sebagai “pendatang”. Akan tetapi istilah pendatang sebenarnya merupakan bagian yang terpisah dengan fakta-fakta sosial di mana suatu masyarakat hidup. Istilah pendatang tidak dapat diberi batasan, sehingga sangat sulit mengklasifikasikan masyarakat yang beragam deng²⁰kelompok pendatang di suatu tempat.

Para sosiolog dan antropolog meyakini bahwa setiap individu dan k²⁰mpok pasti memiliki kebutuhan masing-masing. Karena meningkatnya jumlah tuntutan dari berbagai kelompok tersebut, maka munculah perpaduan dari setiap kelompok sebagai mikrokultur, minimal mereka disatukan dalam homogenitas etnik karena alasan budaya.

Berdasarkan kutipan tersebut, diperlukan sebuah model komunikasi yang meliputi semua komponen masyarakat di Seram Bagian Barat. Sekarang ini, etnis Buton di

wilayah tersebut sadar bahwa mereka sudah termasuk kedalam kelompok masyarakat yang tidak terpisahkan dari komponen anak negeri Seram Bagian Barat. Ini sebuah fakta sosial yang telah berproses dalam tatanan adat di masing-masing wilayah di mana etnis Buton berada. Kondisi ini membuat sulit bagi kita untuk membedakan etnis Buton sebagai komponen mikrokultur dari kultur Seram Bagian Barat. ¹⁶

Menurut (Liliweri, 2005) menjelaskan bahwa sebagian orang menjadi anggota dari sebuah kelompok dan sebagian lainnya tidak tergolong dalam kelompok tertentu. Kelompok pertama bisanya di sebut dengan *silent group*, kelompok ini dengan jelas menampilkan nilai kebudayaanya. Kelompok ini terkadang terstruktur dan dikenal sebagai sub kultur, mikro kultur atau sebagai kelompok referens yang bermuara pada kelompok makro budaya.

Kelompok ini menurut penulis, yang paling tepat disebut dengan etnis Buton, karena mereka terdiri dari kelompok yang masuk kategori subkultur dari budaya tertentu, yaitu budaya masyarakat Seram Bagian Barat. Etnis Buton secara komunikatif memang termasuk dalam kategori *silent group*, karena mereka berpikir bahwa apa yang nantinya mereka sampaikan tidak pernah didengar orang lain. Konteks ini semata-mata karena pertimbangan bahwa mereka adalah bagian dari subkultur budaya yang tidak mungkin memiliki pengaruh terhadap makro budaya di Seram Bagian Barat.

Pertanyaan yang mendasar adalah, apa itu subkultur? istilah ini digunakan untuk menandai suatu kelompok yang memiliki spesifikasi perilaku lebih atau kurang dari perilaku koelompok mayoritas. Subkultural bisa diyakini oleh sekelompok orang yang memiliki persepsi timbal balik dalam peradaban, wilayah, geografis, agama, kesejahteraan, kekayaan, bahasa, kebangsaan, umur, jenis kelamin, pekerjaan dan keluarga. Kategori inilah yang dikatakan mikrokultural karena budayanya memiliki pengaruh yang kuat pada komunikasi antar budaya (Liliweri, 2005)

Jadi kalau mau dilihat, sebenarnya hubungan etnik Buton dengan etnis Ambon memang tidak selamanya menjelma dalam sebuah tatanan makro kultur yang sempurna, karena walau bagaimanapun etnis Ambon merasa diri mereka sebagai bagian dari makro kultur yang memiliki dan menguasai wilayah, geografis, sehingga dibutuhkan kesadaran untuk menerima dan melakukan komunikasi dengan etnis Buton untuk membentuk sebuah sistem integrasi antara mikro kultur dan makro kultur yang sempurna.

1. Komunikasi antarbudaya

Kelompok etnik ialah sekumpulan individu ciri kebudayaannya relatif sama sehingga dapat menjadi cermin bagi para anggota kelompok. Liliwery mengatakan bahwa pengertian etnik sama dengan kelompok agama, suku bangsa, organisasi sosial dan politik. Hanya saja anggotanya memiliki nilai-nilai budaya yang sama sehingga tertutup bagi orang lain untuk dapat masuk dalam kelompok etnik tersebut. Oleh karena itu, bisa dipastikan bahwa komunikasi antar pribadi atau biasa disebut dengan komunikasi antar kelompok agama dapat dikategorikan sebagai komunikasi antaretnik.

2. Komunikasi kelas sosial

Komunikasi ini tergolong dalam komunikasi antarbudaya karena prosesnya dilakukan di antara pribadi-pribadi yang merupakan anggota suatu kebudayaan yang sama hanya saja dipisahkan berdasarkan kelas sosial.

3. Komunikasi antar anggota geografis

Manusia memilih bertempat tinggal sesuai dengan tujuan kehidupannya. Interaksi manusia dalam satu wilayah kerap kali tidak saja membawa interaksi sosial tetapi juga insteraksi budaya. Sehingga dapat ditemukan suatu lingkungan permukiman, desa atau kota yang memiliki ragam suku bangsa dan ras (Liliweri, 2005).

Berdasarkan tiga jenis komunikasi tersebut dapatlah dianalisis bahwa sebenarnya komunikasi itu sangat diperlukan bagi setiap manusia, maupun kelompok. Dalam suatu kelompok kebudayaan komunikasi sangat diperlukan untuk mencairkan kebekuan dan perbedaan prinsip baik, mengenai kehidupan, agama maupun politik. Jika komunikasi tersebut sudah berjalan dengan baik, maka sesungguhnya masyarakat tidak mungkin saling mencurigai. Hakikatnya sebenarnya terletak pada kemampuan masing-masing kelompok untuk melakukan komunikasi dengan menggunakan pendekatan apa saja, yang penting komunikasi bisa berlangsung.

Dalam kasus Seram Bagian Barat, komunikasi antar etnis memang sangat diharapkan untuk merubah cara pandang, sikap keras kepala, dan keengganan untuk menerima pihak lain. Sedangkan komunikasi secara internal antar lembaga sosial dan politik perlu ditempuh untuk mengukur kemampuan dan keberhasilan masing-masing pihak dalam mewujudkan komunikasi yang lebih transparan dan jujur.

Berdasarkan uraian tersebut, seperti cara-cara kerja ontologi yang mengungkap fakta Adanya dalam diskursus eksistensialisme. Sebagaimana pandangan Sartre dalam Suseno, bahwa adanya manusia tidak berada dalam arti biasa. Manusia itu sadar atas keberadaannya sehingga ia menyadari sedang berhadapan dengan kekosongan. Eksistensi bisa dimaknai bahwa keberadaan individu dengan sadar menyadari bahwa ia ada, dan menjorok dari ketidadaannya (Magnis-Suseno, 2006). Jadi, kemanusiaan orang Buton lewat “adanya” secara ontologis karena otonomi dirinya sebagai manusia yang punya kehendak dan kebebasan. Mereka memiliki esensi, dan tanggungjawab atas eksistensi diri mereka. Dalam kenyatannya, ada pilihan-pilihan kemanusiaan, tidak hanya menciptakan nilai, tetapi juga “mengikat diri” mereka dengan kenyataan yang plural di Seram Bagian Barat.

a. Komunikasi Lintas Budaya

Menurut La Saleh orang Buton mengakui mereka sebagai bagian dari anak adat negeri yang ada di Seram Bagian Barat. Informasi ini penulis komparasikan dengan pernyataan Melkias Matinahoru yang menjelaskan bahwa orang Buton yang dekat dengan dusun mereka (Waesamu) justru sangat ramah dan mereka menghargai budaya yang ada di Waesamu. Bahkan orang Buton terlibat secara aktif dalam melakukan hubungan kerjasama dalam bidang sosial ekonomi dan perdagangan. Tetapi orang Buton seringkali sangat tertutup dalam menyampaikan suatu informasi. Hal ini karena mungkin mereka menimbang seberapa besar efek informasi itu jika mereka sampaikan. Sifat tersebut menyebabkan komunikasi antara orang Ambon dan orang Buton tidak lancar, terutama berkaitan dengan isu-isu sensitif yang menyangkut dengan masalah agama.

Berdasarkan paparan tersebut tampaknya memberikan gambaran bahwa masyarakat Maluku memiliki basis kultural yang dapat menyumbangkan kepada integrasi yang kuat. Akan tetapi kekuatan kultural tersebut kemudian mendapat tantangan dari kekuatan-kekuatan politik penjajahan yang turut memboncengi kepentingan politik ekonominya dengan kepentingan agama. Asumsinya adalah faktor politik ekonomi selalu berperan dalam sejarah konflik agama di Maluku dan hal ini juga berimplikasi pada distorsinya nilai-nilai kultural masyarakat. Akibat lebih jauh adalah masyarakat tersegmentasi dalam lapisan-lapisan sosial keagamaan, dan cenderung dipelihara dalam kerangka kepentingan politik oleh negara Indonesia ketika nilai-nilai budaya Maluku terdistorsi ke dalam hegemoni konsep developmentalisme.

Agama yang heterogen di Seram Bagian Barat sebenarnya merupakan suatu modal bersama untuk mengembangkan toleransi. Tetapi terkadang agama sering diselipkan untuk kepentingan tertentu, terutama menjelang pemilihan Kepala Daerah (Bupati).

Kondisi ini sebagaimana digambarkan oleh Bubandt (2014) dalam *On the Margins of Conflict: A Introduction*, bahwa

Political provocation, economic, tensions, discursive provocation, as well as local adaptations to religious and ethnic forms of identification are shown to have fused in various ways to provide different kinds of impetus and motive for participation in each of the many individual riots that flared up throughout eastern Indonesia after 1999. While each clash (even within one conflict region like Maluku or Poso) frequently has turned out to be politically and experientially unique, they also fed into one another, each riot adding to a growing sense of national paranoia, elaborated and disseminated in the media. And in the process each violent clash sowed the seeds for the outbreak of violence elsewhere.

Bubandt memberikan argumentasinya sebagai berikut:

is the combined result of changes in global forms of governance, a strong political focus on ethnic and religious identity in the 'era reformasi' and a local willingness to employ these identities to garner support in the new political landscape of decentralisation. The new politics of tradition thus played complex roles both in the production of the eastern Indonesian wars and in current attempts to reconcile affected communities after conflict (Bubandt, 2014).

Berdasarkan penjelasan tersebut, memang masalah politik sangat berpengaruh pada pembentukan opini maupun persepsi masyarakat, apalagi masyarakat yang tingkat kekritisannya masih rendah hal ini sudah tentu akan memproyeksikan pandangan masyarakat terhadap orang-orang di sekitar mereka yang merupakan kelompok lain yang bersebaran secara politik. Integrasi masyarakat di Seram Bagian Barat sebenarnya sangat dibutuhkan dalam rangka menciptakan kemandirian antar sesama kelompok etnis maupun agama berdasarkan prinsip-prinsip kebersamaan dan solidaritas sosial. Secara simultan, di Seram Bagian Barat, belum ditemukan adanya pertikaian etnis maupun agama yang tidak dapat diselesaikan. Pertikaian memang ada, tetapi hanya bersifat sementara yang berkenaan dengan kasus-kasus tanah adat. Akan tetapi sejauh ini masyarakat telah menyadari bahwa hidup berdampingan sangat diperlukan untuk menentukan masa depan bersama yang lebih baik. Hal ini membutuhkan keterlibatan masyarakat untuk melakukan komunikasi lintas kelompok, suku dan agama sangat diperlukan agar terbentuk suatu kekuatan integrasi untuk menyongsong perubahan di Maluku.

Hal ini dilakukan dengan melihat norma masyarakat dan budaya, melalui pengelompokan dan proses generalisasi ada kenyataan mer⁶ni perilaku yang berkembang pada manusia bisa terbentuk dalam satu konsep utuh. Jadi hubungan sosial kemasyarakatan serta norma dan budaya dapat menjadi sebuah konsep yang terlahir dari generalisasi terhadap kenyataan atas perilaku manusia (Marzali, 2014)

⁶ Masyarakat terbentuk dari struktur sosial yang terdiri atas hubungan sosial yang dilakukan secara kompleks antara anggota-anggotanya. Hubungan sosial yang dibangun antara anggota tertentu pada suatu waktu dan ditempat tertentu tidak dapat dipandang sebagai satu hubungan sosial yang luas, yang melibatkan keseluruhan anggota masyarakat tersebut. Individu yang termasuk dalam komponen struktur sosial tersebut

tidak dapat dipandang dari sudut biologis tetapi sebagai individu yang memiliki kedudukan dan status yang sama dalam struktur sosial tersebut.

Perbedaan dalam struktur sosial dapat membentuk hubungan sosial seperti apa yang dapat terjalin dan bisa mempengaruhi struktur sosial tersebut. Dalam masyarakat tradisional, status para anggota dibedakan menurut jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), tingkatan umur dan hubungan kekerabatan ibu, ayah, anak, saudara akan berbeda dari orang lain. Akibatnya perilaku pria ketika berhubungan dengan pria lain akan berbeda dengan ketika dia berhubungan dengan wanita, begitu juga perilaku orang tua akan berbeda kepada yang lebih muda (Marzali, 2014).

Malinowsky menekankan pada aspek manusia sebagai makhluk psiko biologis dalam sebuah masyarakat (kebudayaan). Bahwa manusia adalah makhluk psiko-biologis yang memiliki kebutuhan psikologis dan biologis yang harus terpenuhi. Bagi Malinowski dalam untuk bisa memenuhi kebutuhan tersebut, individu perlu menjaga kesinambungan dalam kelompok sosial dan beberapa komponen harus dipenuhi oleh anggota kelompok sosial tersebut (Marzali, 2014).

b. Munculnya Politik Identitas

Dalam sebuah bukunya, antropolog Ronald Niezen menjelaskan asal usul dan menjabarkan perkembangan identitas politik yang relatif baru dikenal sebagai indigenitas (*indigeneity*). Munculnya legitimasi *indigeneity* ini berawal dari penguatan gerakan internasional masyarakat adat yang berlabel indigenis. Bagi Niezen, gaung *indigenisme* berpusat pada kesamaan pada keadaan yang memprihatinkan, yakni marginalisasi, kemiskinan serta genosida budaya diantara populasi masyarakat adat di seluruh dunia yang sangat beragam. Seperti yang diharapkan, buku tersebut memuat pembelaan yang menggelora bagi masyarakat adat di manapun agar mereka dapat menikmati hak menentukan nasib sendiri. Niezen kadang-kadang memperlunak dukungannya dengan menyelipkan ungkapan-ungkapan peringatan dalam narasinya. Contohnya, sebagai keberatan atas pembelaan politis, moral dan konseptual dari hak kolektif yang dipegang erat gerakan masyarakat adat. Niezen menanyakan hal sebagai berikut (Davidson et al., 2010):

Dalam situasi kompleksitas dan ambiguitas moral, bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan tentang hak dan tanggungjawab? bagaimana masyarakat adat bisa mendapatkan keadilan yang pantas mereka dapatkan ketika ada kebingungan, baik dalam kasus-kasus umum maupun spesifik, atas kedudukan mereka sebagai korban, para aktor yang bertanggungjawab, dan pelanggar-pelanggar hak asasi manusia dari anggota masyarakatnya sendiri ataupun orang lain?

Kalau disederhanakan kata masyarakat adat tidak dimaksudkan sebagai pemberian legitimasi kepada masyarakat adat di Seram Bagian Barat. Konsep ini sesungguhnya bersifat umum, dan hampir sebagian besar peran masyarakat adat selama ini juga dikebiri oleh kekuasaan yang menganggap remeh kekuasaan adat. Terutama berkaitan dengan munculnya sistem politik identitas yang sebenarnya juga sering mengatasnamakan masyarakat adat.

Menurut sejarawan Taufik Abdullah, adat merupakan kebiasaan masyarakat setempat yang di dalamnya terdapat unsur tertentu. Ini bermakna bahwa adat membentuk landasan pertimbangan hukum dan etis menjadi sumber munculnya ekspektasi sosial. Singkatnya, adat merepresentasikan konsep adaptif, dinamis serta

fleksibel dan tidak bersifat kaku. Permasalahannya adalah bagaimana sampai adat dapat dijelaskan seiring dengan munculnya politik identitas? (Salim, 2017)

Menurut Biezeveld, proses ini sudah berlangsung sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada tahun 1901 pemerintah kolonial memberlakukan sebuah program kebijakan yang dikenal dengan “politik etis” yang dimaksudkan untuk menunjukkan perhatian khusus pada sistem paternalistik atas kesejahteraan masyarakat pribumi yang dianggap terancam oleh pembangunan komersial dan westernisasi yang tidak terkendali. Kajian mengenai adat merupakan dimensi penting dalam politik etis (Maliki, 2018).

Dari perbedaan identitas dan perpaduan unsur agama dan budaya umumnya dapat dipahami lewat definisi-definisi etnis yang berbentuk berdasarkan kelompok masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu, yang memiliki bahasa, sejarah, agama, cara hidup, perasaan, nasib dan aspirasi yang sama. Dalam hal ini Smits dan Moore mengatakan bahwa (Mudiansyah, 2001);

.... *that identities are “produced”, echoes our theme for this issue, namely the idea of “consuming” identities, which is intended to refer to how the resources for self, subjectivity and identity are found in the intricate relations between self and other, between self and the cultures and societies we live in...*

54

Brewer and Gardner pernah menulis dalam *Journal of Personality and Social Psychology* dengan judul; “*Who is this ‘we’?*” membuat tingkatan tentang representasi diri dengan tingkatan yang berbeda yaitu, tingkatan yang individu, tingkatan yang mengukur hubungan antar pribadi dan kelompok. Di tingkatan yang individu, ada ‘diri yang pribadi’, yang menghadirkan yang dibedakan, konsep yang individuated dari diri; di tingkatan yang hubungan antar (pribadi, ada ‘*relational self*’), yang menghadirkan konsep diri untuk memperoleh koneksi dari hubungan dan peranan yang penting dengan orang yang lain; dan di tingkatan kelompok, ada ‘diri yang kolektif’, yang menghadirkan konsep penting tentang diri untuk memperoleh keanggotaan kelompok.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diasumsikan bahwa sebenarnya politik dan identitas merupakan dua hal yang sama-sama memiliki pengaruh dalam membentuk perilaku kelompok. Di satu sisi, orang Buton merasa kelompok mereka memiliki pengaruh untuk memobilisasi masyarakat etnik lokal, di sisi lain, kelompok etnis Ambon merasa memiliki legitimasi penuh atas wilayah-wilayah adat yang di dalamnya berdiam kelompok orang Buton. Sehingga apapun tingkatan orang Buton tersebut, penting untuk disesuaikan dengan kepentingan etnis lokal Ambon. Dengan demikian maka, proses integrasi tersebut berjalan sesuai dengan tingkat pemahaman dan keberadaan masing-masing pihak.

Oleh karena itu, kalau mengukur tingkat integrasi tersebut sangat rentan terhadap isu-isu yang bermuatan memecah belah persatuan masyarakat di Seram Bagian Barat. Tetapi kemudian, masyarakat menyadari bahwa perpecahan tidak akan menghasilkan keuntungan apapun, dan karena itu semua pihak diarahkan untuk memupuk kesadaran untuk menerima keanekaragaman baik dalam budaya, maupun agama.

c. Pendekatan ontologis ke Teori Identitas Kelompok

Uraian ini difokuskan pada beberapa teori yang memiliki signifikansi dengan relasi antar kelompok, hal ini untuk melihat apakah teori-teori ini dapat dijadikan sebagai alat untuk menegaskan kembali proses integrasi. Di dalam teori tersebut terdapat makna-makna ontologis yang membuka tabir pengetahuan ke tidaktahuan, dari sifat abstrak

menjadi sehingga bisa dirangkumkan bahwa pemaknaan dari kajian ontologis sangat fleksibel bagi semua teori pengetahuan.

a. Konsep Sintalitas

Sintalitas (*syntality*) merupakan istilah yang digunakan oleh Cattell untuk menggambarkan kepribadian kelompok. Jadi, sintalitas analog dengan kepribadian pada individu dan mencakup hal-hal seperti kebersamaan, dinamika, temperamen, dan kemampuan kelompok.

Dasar dari pendapat Cattell adalah pandangan McDougall, sebagaimana yang dikutip Sarwono tentang kelompok sebagai berikut:

1. Perilaku dan struktur yang khas dari suatu kelompok akan tetap ada walaupun anggota-anggotanya berganti-ganti.
2. Pengalaman-pengalaman kelompok di rekam dalam ingatan
3. Kelompok mampu berespons secara keseluruhan terhadap suatu rangsang yang tertuju pada salah satu bagiannya
4. Kelompok menunjukkan adanya dorongan-dorongan
5. Kelompok menunjukkan emosi yang bervariasi
6. Kelompok menunjukkan ada pertimbangan-pertimbangan kolektif (bersama) (Sarwono, 2005)

b. Dimensi-Dimensi Kelompok

Menurut Cattell bahwa terdapat tiga panel dalam kelompok sebagai berikut:

1. Sifat-sifat sintalitas (*syntality traits*) yaitu pengaruh dari adanya kelompok sebagai keseluruhan, baik terhadap kelompok lain maupun terhadap lingkungan.
2. Sifat-sifat struktur kelompok (*structural characteristics*) yaitu hubungan antaranggota kelompok, perilaku-perilaku di dalam kelompok, dan pola organisasi kelompok. Contoh: kepemimpinan, peran, klik, status, pola komunikasi, dan lain-lain.
3. Sifat-sifat populasi (*population traits*) yaitu sifat rata-rata dari anggota kelompok. Misalnya, kecerdasan rata-rata, banyaknya peristiwa kriminal, sikap rata-rata terhadap berbagai masalah sosial, dan lain-lain (Sarwono, 2005)

c. Dimensi Sintalitas

Selanjutnya, Cattell menyatakan bahwa ada dua aspek penting pada kelompok, yaitu:

1. Eksistensi kelompok tergantung pada kebutuhan individu anggotanya, kelompok akan tetap berdiri selama dapat memenuhi kebutuhan psikologi anggotanya
2. Kelompok-kelompok biasanya saling tumpang tindih (*over lapping*), seorang individu secara simultan bisa menjadi anggota beberapa kelompok yang berbeda (Sarwono, 2005).

Berdasarkan pandangan Cattell tersebut dapat digaris bawahi bahwa kelompok dan individu sangat berperan besar dan memiliki ketergantungan untuk keberlangsungan sebuah proses integrasi. Hubungan timbal balik antara kelompok dan individu dan sebaliknya, justru sangat dibutuhkan untuk mendukung cita-cita integrasi yang lebih besar lagi.

¹² Simon (2008) memberikan aspek model identitas kelompok ini meliputi, *Personality traits* (e.g. shy), *Abilities* (e.g. poor dancer), *Physical features* (e.g. curly hair, slim), *Behavioural characteristics* (e.g. usually gets up early), *Ideologies* (Christian, democrat), *Social roles* (e.g. project manager), *Language affiliation*, (e.g. English, Chinese), *Group memberships* (e.g. female, academic, Christian)

Spencer-Oatey (2007) mengatakan bahwa;

⁴
People may differ in the degree to which they differentiate their various attributes (i.e. the number of different facets that an individual spontaneously uses in thinking about the self) and the degree to which they are integrated (i.e. the extent to which the various facets are interrelated). Nevertheless, they (consciously or sub-consciously) perceive and evaluate their self-aspects in a number of different ways.

Ada semacam penekanan pada serajat manusia yaitu sikap menghargai perbedaan, baik secara langsung atau tidak, khususnya menyangkut dengan kemampuan kelompok untuk menciptakan suatu kekuatan bersama dalam menegakkan sendi-sendiri integrasi.

Simon (2008) mempertanyakan apakah fungsi dari identitas itu?

- ⁵
1. *Identity helps to provide people with a sense of belonging (through their relational and collective self-aspects) and with a sense of distinctiveness (through their individual self-aspects).*
 2. *Identity helps people 'locate' themselves in their social worlds. By helping to define where they belong and where they do not belong in relation to others, it helps to anchor them in their social worlds, giving them a sense of place.*
 1. *The many facets of identity help provide people with self-respect and self-esteem. People's positive evaluations of their own self-aspects help build their self-esteem. However, self-respect and self-esteem do not result simply from independent reflection; the respectful recognition of relevant others also plays a*

³² *crucial role.*

Teori pernyataan diri dalam kehidupan sehari-hari (*theory of Self Expression in Everyday* ²⁴*life*) dikemukakan oleh Erving Goffman. Goffman mengatakan bahwa inetraksi antar individu maupun dalam kelompok terjadi karena adanya kesamaan tampilan yang bersifat teatrical (Liliweri, 2005). Asumsi Goffman bahwa perilaku yang ditampilkan dan diharapkan dalam interaksi antar etnik mengandung simbol-simbol tertentu yang dipakai sebagai patokan dari perilaku bersama. Intinya, orang akan mejadi satu karena ada kesamaan adat istiadat, warna kulit, orientasi budaya, warna kulit serta kesamaan lainnya.

Teori ini memberikan suatu kerangka pikir yang jelas tentang proses asimilasi etnis Buton dan etnis Ambon yang ada di Seram Bagian Barat bahwa kedua etnis ini sama-sama melakukan interaksi untuk menyatu dalam sebuah kerangka adat atau kebudayaan. Orang Buton menurut hemat saya, akan turut memilih sistem-sistem adat yang ada di wilayah tersebut untuk menjadikan mereka sebagai bagian dari masyarakat adat. Kecuali para pendatang yang baru menetap dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama.

Milton Gordon adalah seorang asimilasionis ⁴² a mengatakan bahwa para pendatang baru memiliki tujuan tersendiri ketika berada di daerah baru, sehingga menurutnya kita harus membedakan tujuan dan kedatangan mereka dengan hasil yang diperoleh dari proses asimilasi tersebut (Liliweri, 2005).

Sesuai uraian tersebut di atas, maka kerangka intergasi masyarakat di Seram Bagian Barat dapat terbangun dengan baik, yaitu dengan jalan menerima perbedaan dan keragaman budaya maupun keyakinan.

Tajfel & Turner menekankan bahwa perilaku individu dapat mencerminkan unit masyarakat lebih besar dari individu. Ini berarti itu melingkupi struktur masyarakat seperti kelompok, organisasi, kultur, dan paling utama, identifikasi individu dengan unit kolektif ini memandu struktur internal dan proses. Kemampuan/ wewenang yang budaya berada berada di pusat teori ini sebab keanggotaan kelompok yang kolektif mempengaruhi dan sering menentukan perilaku dan pemikiran individu.

Seerti itu, individu tidaklah disatukan unit dari analisa psikologis. Negara dalam teori merupakan identitas orang-orang berpikir, merasakan, dan bertindak sebagai anggota dari kelompok yang kolektif, institusi, dan kultur. Pendekatan identitas yang sosial menguatkan gagasan di mana pengamatan sosial individu adalah secara sosial diterangkan tergantung pada kelompok mereka atau kerangka acuan yang kolektif. Sebagai contoh, imigran yang lihat diri mereka seperti secara negatif digambarkan dengan sinis oleh karena warna kulit lebih gelap mereka atau ditekankan adalah lebih sedikit berkeinginan berakulturasi, percaya yang seperti (itu) pandangan yang negatif akan tetap berlaku dengan mengabaikan apakah mereka adalah secara kultural berkompeten di kultur yang dominan (Mardiansyah, 2001)

Teori ini menyatukan tiga poin utama: (a) Orang-Orang yang termotivasi untuk memelihara sesuatu yang bersifat positif, yaitu suatu konsep diri (*self-concept*) (b). *Self-concept* diperoleh dari identifikasi kelompok, dan (c) orang-orang menetapkan identitas sosial dengan baik dan membandingkannya dengan orang di dalam kelompoknya dengan golongan luar.

Uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Politik identitas sebenarnya merupakan bagian dari politik etnis yang dijalankan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Dalam hal politik etnis dijalankan untuk mengubah struktur adat dalam suatu masyarakat.
2. Masalah utama integrasi ini adalah terletak pada bagaimana semua kekuatan masyarakat bersatu dan tidak boleh disepelekan juga masalah moral, sejarah dan agama, karena unsur-unsur ini masih diperlukan untuk menopang integrasi etnis yang beraneka ragam suku dan agama
3. Setiap kelompok maupun individu dapat membentuk identitasnya masing-masing tanpa membedakan satu dengan lainnya.

Oleh karena itu ada tiga model untuk melihat secara komplementer posisi etnis Ambon menurut etnis Buton ini antara lain sebagai berikut:

a. Model Pluralisme Budaya

Model ini dapat menjadi patokan dalam melakukan resolusi konflik. Misalnya dalam meminimalisir konflik antar etnik, masyarakat diajak memberikan tanggapan terhadap lingkungan sosial dengan mengadopsi kebudayaan yang baru masuk, melalui asimilasi antar etnik. Selain asimilasi, akomodasi juga berperan penting dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Dalam akomodasi, dua etnik yang mengalami konflik harus sepakat menerima perbedaan budaya di antara keduanya, dan penerimaan itu menciptakan kepentingan bersama (Liliweri, 2005).

Konflik dalam masyarakat multikultural itu terjadi karena ada penolakan dan penerimaan terhadap humanisme. Jika arah penerimaan dan penolakan di baca dalam skala di atas, maka terlihat hanya masyarakat multikultural yang mengakui pluralisme saja saja yang diharapkan mampu menerima dan bahkan mendorong kehadiran beragam kelompok etnik.

Berdasarkan uraian tersebut tampak disamping sikap penerimaan, ada juga sikap keterbukaan yang perlu ditonjolkan oleh kelompok etnis agar dapat membuka diri dari setiap perkembangan. Karena keterbukaan merupakan unsur yang penting untuk menunjang sikap penerimaan tersebut.

b. Model Akulturasi Colleen Ward

Model ini menunjukkan bahwa keragaman budaya ditentukan oleh faktor kognitif manusia. Artinya bahwa, bila setiap individu mengetahui identitas dirinya (*self identity*) maka dia dapat membandingkan identitasnya dengan identitas orang lain. Atas alasan itu maka setiap etnik ingin hidup bersama dalam suatu masyarakat. Asumsinya, menurut Liliwery adalah semakin tinggi pengetahuan seseorang tentang keragaman budaya maka semakin baik persepsinya terhadap kelompok lain.

c. Model Hipotesis Kontak

Gordon Allport, seorang psikolog-sosial yang merintis teori prasangka dalam bukunya *The Nature of Prejudice*, yang membahas prasangka sosial antaretnik atau antarras. Kata Allport sebagaimana dikutip Liliwery (2005) bahwa prasangka antaretnik atau antarras itu dapat dikurangi jika setiap etnik melakukan kontak dengan etnik yang berbeda.

Hipotesis kontak Allport itu kemudian dikembangkan pula dalam model Berry. Dua model berikut ini dapat membantu kita melakukan resolusi konflik antaretnik.

1. Integrasi antara dua atau lebih etnik dapat terjadi karena setiap orang berhasil memelihara tradisi budayanya
2. Separasi antaretnik dapat terjadi kalau setiap etnik memelihara tradisinya namun tidak melakukan kontak dengan etnik lain
3. Asimilasi antaretnik dapat terjadi ketika satu etnik tidak memelihara tradisi budayanya. Dalam keadaan ini, etnik tersebut menerima tradisi budaya orang lain di samping budayanya sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut, maka apa yang sedang berlangsung di Seram Bagian Barat merupakan persoalan yang dapat didekati dengan model-model komunikasi untuk mengurangi stereotip atau prasangka sosial lainnya. Komunikasi antar kelompok sangat diperlukan untuk mengukur seberapa besar daya penerimaan masyarakat terhadap etnik lain, ataupun antaretnik lokal sendiri.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, secara integral setiap komponen memiliki hubungan satu dengan lain, dan hubungan yang harmonis dari masing-masing komponen inilah yang dapat membentuk kekuatan masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Tetapi apabila komponen kekuatan komunal dipengaruhi oleh adanya stereotipe maka nilai-nilai kekerabatan, soliditas sosial, dan kearifan lokal bisa terganggu.

III. Penutup

Kesimpulan

56

Berdasarkan pada uraian-uraian tersebut di atas penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut

- a. Relasi orang Buton dengan orang Ambon di Seram Bagian Barat merupakan relasi persaudaraan. Namun tidak dapat dihindari bahwa, stereotipe juga bisa muncul dalam situasi di mana masyarakat sudah terpengaruh dengan stigma negatif berupa pelabelan sosial dan agama yang sangat merugikan satu pihak. Stereotipe di Seram Bagian Barat bersifat tertutup dan sudah massif. Artinya, masyarakat sudah biasa menggunakan pelabelan negatif untuk saling

53. ndiskreditkan. Streotipe mengalami puncaknya di momen-momen tertentu seperti pemilihan kepala daerah atau pemilihan anggota legislatif.

- b. Streotipe di Seram Bagian Barat itu selalu ada. Walaupun masyarakat SBB sudah mengalami proses akulturasi tetapi persoalan identitas anak adat dan bukan anak adat seringkali memberikan warna yang menyolok dengan memposisikan masing-masing etnis pada pelabelan negatif. Walaupun etnis Buton sudah puluhan tahun mendiami Seram Bagian Barat tetapi streotipe tersebut tidak pernah hilang, ibarat sesuatu yang sudah mandarah daging dan tidak bisa disembuhkan lagi.
- c. Kajian ontologi diperlukan untuk membedakan pelabelan dari streotipe agar memberikan kesadaran pengetahuan bagi masyarakat. Ontologi mengubah pandangan minor terhadap kedudukan manusia, terutama masyarakat Seram Bagian Barat agar mengutamakan harkat dan martabat manusia. Bahwa manusia adalah makhluk otonom dengan nilai-nilai dan prinsip hidupnya sendiri tidak bisa dihina, dirampas hak-haknya maupun disepelekan. Semua manusia memiliki derajat kemanusiaan yang sama, mendapat tempat dan kehidupan yang sama dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Aryati, A. (2018). Memahami Manusia Melalui Dimensi Filsafat (Upaya Memahami Eksistensi Manusia). *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, 7(2), 79–84.
- Bartels, D. (2003). Your God is no longer mine: Moslem-Christian fratricide in the Central Moluccas (Indonesia) After a half-millennium of tolerant co-Existence and ethnic unity. *A State of Emergency: Violence, Society and the State in Eastern Indonesia*, 128–153.
- Bubandt, N. (2014). Conspiracy theories, apocalyptic narratives and the discursive construction of 'the violence in Maluku.' *Antropologi Indonesia*.
- Davidson, J. S., Henley, D., & Moniaga, S. (2010). *Adat dalam Politik Indonesia* (1st ed.). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hecht, M. L., & Phillips, K. E. (2021). Communication Theory of Identity. *Engaging Theories in Interpersonal Communication*, 221–232. <https://doi.org/10.4324/9781003195511-20>
- Kaelan, H. (2010). Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner. *Yogyakarta: Paradigma*.
- Kosilah, K., & Andarias, S. H. (2019). Mengenal Identitas Masyarakat Buton Melalui Konsep Berkeluarga Dalam Kabanti Kaluku Panda. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 3(2), 39–49. <https://doi.org/10.35326/pencerah.v3i2.280>
- Liliweri, A. (2005). *Prasangka dan konflik; komunikasi lintas budaya masyarakat multikultur*. LK Pelangi Aksara.
- Ignis-Suseno, F. (2006). *Etika Abad ke-20: 12 Teks Kunci*. Penerbit Kanisius.
- Maliki, Z. (2018). *Sosiologi politik: makna kekuasaan dan transformasi politik*. Ugm Press.
- Mardiansyah, A. (2001). Negara Bangsa dan Konflik Etnis: Nasionalisme vs Etno-Nasionalisme. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(3), 289–316.
- Arzali, A. (2014). Struktural-fungsionalisme. *Antropologi Indonesia*.
- Muliono, M. (2020). Pola Perubahan, Wacana, dan Tren Korporasi Sosial di Indonesia. *Al-Adyan: Journal of Religious Studies*, 1(2), 115–132. <https://doi.org/10.15548/al-adyan.v1i2.1949>
- Neuliep, J. W., & Johnson, M. (2016). A cross-cultural comparison of Ecuadorian and United States face, facework, and conflict styles during interpersonal conflict: An application of face-negotiation theory. *Journal of International and Intercultural Communication*, 9(1), 1–19. <https://doi.org/10.1080/17513057.2016.1120844>
- Palmer, B. (2014). Migrasi dan Identitas: Perantau Buton yang Kembali ke Buton Setelah Konflik Maluku 1999–2002. *Antropologi Indonesia*, 0(74). <https://doi.org/10.7454/ai.v0i74.3512>
- Patty, A. (2008). *Konflik etnis-agama di Seram Barat:: Suatu kajian dengan pendekatan EWS*. Universitas Gadjah Mada.
- Rokhmah, D. (2021). Ilmu dalam Tinjauan Filsafat: Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 7(2 SE-), 172–186. <https://ejurnal.staiha.ac.id/index.php/cendekia/article/view/12457>
- Salatalohy, F. (2004). *Membangun Etika Multikulturalisme*. dalam Nasionalisme Kaum Pinggiran: Dari Maluku, Tentang Maluku, Unutk
- Salatalohy, F., & Pelu, R. (2004). *Nasionalisme kaum pinggiran: dari Maluku tentang Maluku untuk Indonesia*. PT LKiS Pelangi Aksara.

- 7
Salim, M. (2017). Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Perwujudan Ikatan Adat-Adat Masyarakat Adat Nusantara. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6(38), 65–74. <https://doi.org/10.24252/ad.v6i1.4866>
- Sarwono, S. W. (2005). *Psikologi prasangka orang Indonesia: kumpulan studi empiris prasangka dalam berbagai aspek kehidupan orang Indonesia*. <http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=5954&lokasi=lokal>
- 46
Simpson, B. (2008). Identity in Modern Society: A Social Psychological Perspective. In *Identity in Modern Society: A Social Psychological Perspective*. John Wiley & Sons. <https://doi.org/10.1002/9780470773437>
- Spencer-Oatey, H. (2007). Theories of identity and the analysis of face. *Journal of Pragmatics*, 39(4), 639–656. <https://doi.org/10.1016/j.pragma.2006.12.004>
- 7
Sujati, B. (2018). Konsepsi Pemikiran Filsafat Sejarah Dan Sejarah Menurut Ibnu 58
aldun. *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 6(2).
31 <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v6i2.3521>
- Susetyo, B. (2010). Stereotip dan relasi antar kelompok. *Graha Ilmu*, 13–220.

ORIGINALITY REPORT

27%
SIMILARITY INDEX

27%
INTERNET SOURCES

8%
PUBLICATIONS

11%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 jumailischaniago.wordpress.com 9%
Internet Source

2 www.jai.or.id 2%
Internet Source

3 konselinghartono.files.wordpress.com 2%
Internet Source

4 core.ac.uk 1%
Internet Source

5 www.elsevier.com 1%
Internet Source

6 blog.unnes.ac.id 1%
Internet Source

7 www.researchgate.net 1%
Internet Source

8 etd.repository.ugm.ac.id 1%
Internet Source

9 Submitted to London School of Economics and Political Science 1%
Student Paper

10	kutikata.blogspot.com Internet Source	1 %
11	jcacs.journals.yorku.ca Internet Source	<1 %
12	Submitted to University of Warwick Student Paper	<1 %
13	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	<1 %
14	ejournal.upnvj.ac.id Internet Source	<1 %
15	ejurnal.undana.ac.id Internet Source	<1 %
16	komunikasilintasbudayamelinda311.blogspot.com Internet Source	<1 %
17	cdn.arid.my Internet Source	<1 %
18	asriaydes.blogspot.com Internet Source	<1 %
19	www.timur-angin.com Internet Source	<1 %
20	niwayanmari.blogspot.com Internet Source	<1 %
21	Submitted to Universitas Negeri Makassar Student Paper	<1 %

22	ojs.unikom.ac.id Internet Source	<1 %
23	repo.iainsasbabel.ac.id Internet Source	<1 %
24	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
25	jurnal-umbuton.ac.id Internet Source	<1 %
26	www.ejurnal.staiha.ac.id Internet Source	<1 %
27	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
28	Submitted to Santa Barbara City College Student Paper	<1 %
29	ejournal.uinib.ac.id Internet Source	<1 %
30	eprints.uny.ac.id Internet Source	<1 %
31	vdocuments.site Internet Source	<1 %
32	fuzinoviyanti.wordpress.com Internet Source	<1 %
33	Submitted to Sekolah Cikal Jakarta Student Paper	<1 %

34	isif.ac.id Internet Source	<1 %
35	ejournal.ihdn.ac.id Internet Source	<1 %
36	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
37	ejournal2.undip.ac.id Internet Source	<1 %
38	catalog.hathitrust.org Internet Source	<1 %
39	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
40	www.sciencescholar.us Internet Source	<1 %
41	docplayer.net Internet Source	<1 %
42	journal.unmasmataram.ac.id Internet Source	<1 %
43	123dok.com Internet Source	<1 %
44	repository.ugm.ac.id Internet Source	<1 %
45	sabdakhairuss.blogspot.com Internet Source	<1 %

46	biblio.ugent.be Internet Source	<1 %
47	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
48	www.goresanintelektual.com Internet Source	<1 %
49	adoc.pub Internet Source	<1 %
50	journal.unj.ac.id Internet Source	<1 %
51	mafiadoc.com Internet Source	<1 %
52	publication.petra.ac.id Internet Source	<1 %
53	bendaghaib.com Internet Source	<1 %
54	ervinekiddies.wordpress.com Internet Source	<1 %
55	ijersc.org Internet Source	<1 %
56	www.scribd.com Internet Source	<1 %
57	jurnaliainpontianak.or.id Internet Source	<1 %

58

Heri Firmansyah, Pagar Pagar, Muhammad Amar Adly. "The North Sumatra MUI's Fatwas on Zakat: Analysis of Fatwa Methods and the Influence of School Thought", *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 2022

Publication

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off